

## Analisis Standar Belanja Dan Kewajaran Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Ulfah Nas, Muhammad Su'un, Fadliah Nasaruddin

Universitas Muslim Indonesia

Email: [ulfahn45@gmail.com](mailto:ulfahn45@gmail.com)

(Diterima: 10 Agustus 2020; direvisi: 14 Agustus 2020; dipublikasikan: 1 Oktober 2020)



©2020 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

**Abstract:** *The purpose of this research is to determine the application of "Sinjai Regency Government Expenditure and Budget Fairness Standard Analysis in Fiscal Year 2018". The data type of this research is auxiliary data. Although the data source of this study is the implementation document of the Senjay District Health Bureau of the District War Organization (DPA-OPD) in FY2018, the results show that: 1) The analysis process and analysis of the standard expenditure analysis (ASB) of the Senjay District Health Bureau The application shows the minimum value. Evaluate the minimum cost fairness that must be achieved in the use of the budget, and the maximum limit of the use of the budget is the maximum. 2) Among the 6 (six) types of activities in the ASB group of the Health Bureau, out of a total of 36 activities, only 3 (3) activities are reasonable, and the rest belong to unreasonable categories, that is, 19 activities and overfinancing or 14 activities.*

**Keywords:** *Analysis of Expenditure Standards, Budget Fairness*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Analisis Standar Belanja dan kewajaran anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah dokumen pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses analisis dan penerapan Analisa Standar Belanja (ASB) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai menunjukkan nilai minimal untuk batas terendah kewajaran biaya yang harus dilakukan untuk menilai penggunaan anggaran, sedangkan nilai maksimum digunakan untuk batas tertinggi dalam penggunaan anggaran. 2) Secara keseluruhan dari 36 kegiatan untuk 6 (enam) kategori kelompok ASB pada Dinas Kesehatan hanya 3 (tiga) kegiatan yang wajar, selebihnya dalam kategori tidak wajar, yaitu underfinance (kekurangan pembiayaan) sebanyak 19 kegiatan dan overfinance sebesar 14 kegiatan.

**Kata kunci:** Analisis Standar Belanja; Kewajaran Anggaran

### PENDAHULUAN

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah instrumen/metode sangat penting dalam akuntabilitas perencanaan anggaran. Peraturan perundang-undangan telah mewajibkan (*mandatory*) kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan ASB dalam perencanaan anggaran. ASB mampu mendorong pemerintah daerah menyusun alokasi anggaran yang lebih adil dan akuntabilitas, serta anggaran akan berfokus pada pencapaian target kinerja (*output dan outcome*) yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. Penerapan ASB dalam pengelolaan keuangan akan mampu mengurangi

ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar perangkat daerah (Mahmudi, 2011).

Penerapan ASB terus diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 298 ayat (3) undang-undang ini menegaskan bahwa belanja daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Analisis Standar Belanja (ASB) juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa dalam

pembahasan oleh tim anggaran dilakukan untuk dokumen perencanaan serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja (ASB), standar satuan harga dan standar pelayanan minimal (SPM).

Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup dua hal, yaitu kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD). Evaluasi terhadap kinerja program atau kegiatan yang diusulkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat didasarkan pada tolok ukur kinerja pelayanan dan standar biaya. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan. Tolak ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran berbasis kinerja, terutama untuk menilai kewajaran anggaran biaya suatu program atau kegiatan. Penilaian kewajaran terhadap biaya yang dianggarkan dapat dikaitkan dengan harga standar yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disempurnakan melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam regulasi tersebut selalu disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Sementara dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 298 ayat 3 menjelaskan bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyusunan anggaran berpedoman pada ASB, yang sebelumnya hanya dikatakan penyusunan anggaran berdasarkan pada ASB.

Kabupaten Sinjai adalah salah satu daerah yang terletak di Sulawesi Selatan. Kabupaten Sinjai memiliki jumlah OPD sebanyak 40 yang mana terdiri atas 21 Dinas, 6

Badan, 2 Kantor, dan 9 Kecamatan. Selain itu juga, terdapat OPD dalam bentuk Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah (Sekda). Implementasi penganggaran berbasis kinerja di daerah belum dapat terlaksana dengan baik, karena perangkat-perangkat sistem penganggaran berbasis kinerja itu belum sepenuhnya dikembangkan oleh daerah dan Analisis Standar Belanja yang merupakan perangkat penting penganggaran berbasis kinerja belum banyak disusun di daerah, khususnya Kabupaten Sinjai karena ketersediaan Sumber Daya Manusia yang belum memahami penerapan ASB, sehingga kualitas perencanaan Anggaran Daerah yang digunakan masih relatif lemah.

Dalam penyusunan anggaran khususnya terkait dengan belanja dan beban di Kabupaten Sinjai untuk setiap OPD dibahas dan ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa untuk penyusunan anggaran belanja itu sendiri hanya didasarkan pada pengalaman-pengalaman tahun anggaran sebelumnya tidak didasarkan pada suatu standar belanja yang jelas sehingga pagu anggaran terkadang mengalami kelebihan atau kekurangan. Hal tersebut juga menjadi harapan dari Asisten II Pemerintah Kabupaten Sinjai agar segera menerapkan dan mengoptimalkan Analisis Standar Belanja (ASB), sebab ASB digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah (Resky,2019).

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2018, menunjukkan bahwa total anggaran biaya sebesar Rp 561.541.900.306,00 dengan total realisasi sebesar Rp 538.869.417.168,95. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sisa biaya sebesar Rp 22.672.483.137,05. Keadaan tersebut memunculkan kemungkinan *overfinancing* atau *underfinancing* dalam penyusunan anggaran sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah. Maka dari itu, Anggaran Daerah harus disusun dengan pendekatan kinerja dengan menggunakan Analisis Standar Belanja.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Teori Keagenan**

Di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan

*principal-agent* yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran: pemilih-legislatif, legislatif-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan. Hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang sering timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

Dalam konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agencynya, baik dari segi finansial maupun non finansial. Sementara Von Hagen (2002) secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi *self-interestnya*. Pada akhirnya keunggulan informasi yang dimiliki oleh eksekutif yang dipergunakan untuk menyusun mendorong legislatif untuk menggunakan *discretionary power* untuk mengantisipasi.

### **Analisis Standar Belanja**

Menurut Ritonga (2010: 241), Analisis Standar Belanja (ASB) yaitu pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. Pengertian tentang ASB juga dijelaskan oleh Mahmudi (2010: 107), ASB yaitu biaya standar untuk setiap jenis kegiatan, misalnya biaya standar penyelenggaraan kegiatan *workshop*, sosialisasi, bimbingan teknis, penyusunan laporan keuangan, penyediaan atau pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya.

Menurut Ritonga (2012: 17-20), secara umum ada tiga pendekatan dalam menentukan pola perilaku belanja. Ketiga pendekatan itu adalah pendekatan intuisi, pendekatan analisis *engineering*, dan pendekatan analisis data belanja masa lalu.

#### a. Pendekatan Intuisi

Pendekatan intuisi merupakan pendekatan yang didasarkan intuisi pembuat keputusan. Intuisi tersebut bisa didasari atas surat-surat keputusan, kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain dan sebagainya.

#### b. Pendekatan Analisis *Engineering*

Pendekatan analisis *engineering* merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Misalnya, jika Pemerintah Daerah melakukan kegiatan bimbingan teknis maka diketahui bahwa akan memerlukan lima orang panitia, dua buah komputer, sepuluh rim kertas, dan lain sebagainya. Pendekatan ini memang teliti, namun seringkali memerlukan waktu dan belanja yang relatif tinggi.

#### c. Pendekatan Analisis Data Belanja Masa Lalu

Pendekatan analisis data belanja masa lalu merupakan pendekatan yang didasarkan pada data belanja masa lalu. Pendekatan ini berasumsi bahwa belanja di masa akan datang sama perilakunya dengan belanja di masa lalu. Data belanja masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masing-masing belanja.

Berdasarkan dengan isi Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 93 ayat (1), menyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan ASB (salah satu dasar), dan pada pasal 93 ayat (4) menyatakan bahwa Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan serta memperhatikan prinsip-prinsip dasar penyusunan ASB.

### **Kewajaran Anggaran**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, bahwa dalam sistem anggaran berbasis kinerja, setiap usulan program dan kegiatan serta anggarannya perlu dinilai kewajarannya. Dalam kaitan itu perlu terlebih dahulu ditetapkan Analisis Standar Belanja sebagai pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penilaian kewajaran dalam Analisis Standar Belanja mencakup kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya.

Penilaian kewajaran beban kerja dengan mempertimbangkan kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan, kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan dan kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang

diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Penilaian kewajaran biaya harus mempertimbangkan kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya), kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku dan kaitan antara biaya yang dianggarkan serta target pencapaian kinerja dengan sumber dana. Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber dana untuk mendanai program dan kegiatan, supaya terlebih dahulu, ditetapkan standar satuan harga dengan Keputusan Kepala Daerah. Penetapan standar satuan harga tersebut didasarkan pada satuan harga pasar yang berlaku.

Untuk menentukan klasifikasi kewajaran belanja dilakukan dengan cara membandingkan anggaran yang ada pada masing-masing kegiatan dengan batas belanja minimum dan maksimum. Jika anggaran berada di bawah batas belanja minimum maka termasuk kategori *underfinance* dan sebaliknya jika anggaran berada di atas batas belanja maksimum maka masuk kategori *overfinance*, serta jika anggaran berada diantara batas belanja minimum dan maksimum berarti anggaran dikategorikan wajar.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau menginterpretasikan kondisi/keadaan suatu objek yang diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh dari OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai yang telah dipilih oleh peneliti yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode statistik.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data angka-angka yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018. Dan sumber data diperoleh secara langsung dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 yaitu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

## **Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data untuk bahan analisis dilakukan dengan berbagai cara. Data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, diperoleh dengan cara:

1. Teknik observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data dengan cara mengamati langsung obyek datanya (Jogiyanto, 2010).
2. Metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan melihat dan menganalisis data sekunder. Data yang diambil yaitu dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Sinjai dan diambil dari literature atau buku-buku, artikel ilmiah maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ASB pada kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

### **1. Belanja Rata-rata**

Model ASB yang dibuat dari anggaran kegiatan memperlihatkan bagaimana kewajaran anggaran. Belanja total merupakan penjumlahan dari belanja tetap dan belanja variabel pada suatu target kinerja tertentu. Sementara, Belanja rata-rata adalah belanja total dengan memperhitungkan target kinerja. Belanja rata-rata dalam penelitian ini terlebih dahulu dilihat dari belanja total melalui persamaan model regresi sederhana dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan model regresi untuk masing-masing kelompok ASB: Untuk kelompok ASB Kegiatan Bimbingan Teknis *cost driver* yang digunakan adalah jumlah orang x hari dengan total kegiatan 8 (delapan) diperoleh Belanja Rata-rata dengan persamaan  $Y=46.035.928+41.775x$ . Untuk kelompok ASB Kegiatan Sosialisasi juga menggunakan *cost driver* jumlah

orang dan jumlah hari dengan memperoleh persamaan belanja rata-rata  $Y = 23.493.151 + 173.116x$  dari total kegiatan sebanyak 6 (enam).

Untuk kelompok ASB kegiatan penyusunan laporan menggunakan cost driver unit dan jumlah dokumen dengan total kegiatan sebanyak 9 (sembilan) diperoleh persamaan belanja  $Y = 66.631.292 + 471.654x$ . Untuk kelompok ASB Kegiatan Monitoring dan evaluasi menggunakan *cost driver* jumlah unit kerja x jumlah laporan. Adapun jumlah kegiatan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi diperoleh persamaan  $Y = 36.605.991 + 982.449x$  dari total kegiatan sebanyak 4 (empat).

Kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 5 (lima) kegiatan, dalam merumuskan ASB kelompok Forum Komunikasi dan koordinasi menggunakan cost driver jumlah peserta dan kuensi pertemuan sehingga diperoleh persamaan belanja rata-rata  $Y = 55.195.073 + 45.247x$ . Sedangkan untuk kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan dari total kegiatan 4 (empat) diperoleh persamaan belanja rata-rata  $Y = 58.618.433 + 28.877x$  dengan cost driver yang digunakan dalam perumusan ASB adalah jumlah pemeriksa dan frekuensi pelaksanaan.

## 2. Nilai Minimum dan Maksimum Belanja

Berdasarkan hasil analisis data maka didapatkan nilai minimum dan maksimum belanja kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 dari model regresi untuk masing-masing kelompok ASB, yaitu kelompok ASB kegiatan Bimbingan teknis, ASB kegiatan sosialisasi, ASB kegiatan penyusunan laporan, ASB kegiatan monitoring dan evaluasi, ASB kegiatan forum komunikasi dan koordinasi, ASB kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.

Dengan menggunakan acuan standar belanja minimum dan maksimum hasil dari Analisis Standar Belanja ini diharapkan akan memberi masukan tentang tingkat kewajaran dari anggaran yang diajukan oleh Dinas Kesehatan untuk penentuan realisasi anggaran keuangan. Persentase Alokasi Belanja.

Hasil penelitian ini juga menemukan tingkat kewajaran dari nilai anggaran keuangan pada kegiatan Bimbingan Teknis bahwa dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan masih dalam nilai tidak wajar atau dalam kategori underfinance dan overfinance. Hal tersebut juga terjadi pada Kegiatan Sosialisasi, Penyusunan Laporan, dan Monitoring dan Evaluasi masih dalam kondisi underfinance dan overfinance.

Sedangkan untuk Kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi terdapat 1 (satu) kegiatan yang nilai anggarannya wajar, yaitu kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, sedangkan untuk kegiatan lainnya masih dalam kondisi underfinance dan overfinance.

Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai tahun 2018 yang nilai anggarannya dalam kategori wajar, yaitu Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dan kegiatan Pemeriksaan/Pengawasan Kualitas Air Bersih, Air Minum, Makanan dan Minuman. Sedangkan 2 (dua) kegiatan lainnya yang dianggarkan masih dalam kategori underfinance dan overfinance. Kondisi ini kurang baik, karena pada kondisi overfinance berarti terjadi pemborosan anggaran keuangan untuk itu perlu dikaji penyebab terjadinya kelebihan anggaran. Sedangkan pada kondisi underfinance menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang tidak efisien dan maksimal. Sementara bila ada

kegiatan yang sama dan cost driver yang sama pula, seharusnya anggaran kegiatan yang memiliki kesamaan tersebut harus sama besar (memakai unsur keadilan). Untuk itu diperlukan Analisis Standar Belanja dalam perencanaan anggaran juga sebagai pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ahmad, Misra dan Rosalina (2013) menemukan bahwa urgensi penggunaan ASB sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-OPD sehingga anggaran yang diusulkan oleh OPD menjadi lebih fair sehingga dapat lebih objektif dalam proses penganggaran dan tidak lagi dipengaruhi oleh lobi-lobi politik dan/atau pendekatan lainnya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Winerungan, Rumatte dan Walewangko (2018) yang menyatakan bahwa analisis standar belanja Inspektorat Kota Bitung tahun 2015-2017 terdiri dari persentase/alokasi masing-masing belanja terhadap total belanja, diperoleh nilai minimum dan nilai maksimum untuk standar belanja.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Rangkuman tentang proses analisis dan penerapan Analisa Standar Belanja (ASB) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai menunjukkan nilai minimal untuk batas terendah kewajaran biaya yang harus dilakukan untuk menilai penggunaan anggaran, sedangkan nilai maksimum digunakan untuk batas tertinggi dalam penggunaan anggaran. Dalam perumusan ASB Dinas Kesehatan Sinjai untuk 6 (enam) kategori kegiatan menunjukkan persentase alokasi objek belanja untuk masing-masing aktivitas. Untuk kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan persentase alokasi terbesar pada

belanja sewa rumah/gedung/kantor. Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi alokasi persentase terbesar pada belanja Makan dan Minum. Sedangkan untuk Kegiatan Penyusunan Laporan persentase terbesar pada objek belanja Jasa Kantor dan kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan pada objek belanja Perjalanan Dinas.

2. Secara keseluruhan dari 36 kegiatan untuk 6 (enam) kategori kelompok ASB pada Dinas Kesehatan hanya 3 (tiga) kegiatan yang wajar, selebihnya dalam kategori tidak wajar, yaitu underfinance (kekurangan pembiayaan) sebanyak 19 kegiatan dan overfinance sebanyak 14 kegiatan.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini yaitu :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai dianjurkan untuk memberikan sosialisasi serta mendorong kepada Kepala OPD agar menggunakan ASB pada Perencanaan dan Penyusunan DPA-OPD sehingga pada masa mendatang pemborosan anggaran dapat di minimalisir.
2. Dengan adanya ketidakwajaran yang dilakukan oleh adanya overfinance yang menyebabkan pemborosan anggaran ataupun underfinance yang menyebabkan suatu kegiatan dapat tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai perlu menerapkan ASB dalam menilai kewajaran beban kerja dan biaya selama proses perencanaan dan penyusunan anggaran.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Afridian Wirahadi Ahmad, Fauzan Misra dan Eka Rosalina. (2013). *Penyusunan Analisis Standar Belanja Sebagai Pedoman Penerapan Value For Money Dalam Penganggaran Pada Pemerintah*

- Daerah: Kasus belanja Kegiatan Pelatihan.* Bali. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi. Mei. Vokasi ke-2. Politeknik Negeri Bali.
- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. (2005). *Management Control Systems*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2005). *Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta.
- Bastian, Indra. (2009). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bustami, Bastian dan Nurlaela. (2012). *Akuntansi Biaya, Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Carter, William K. (2009). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariadi, Pramono.dkk. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta; Salemba Empat.
- Haris, Syamsuddin. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Haryanto. (2008). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali dan Dwi Ratmono. (2008). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Semarang: Badan Penerbit: UNDIP.
- Jaya, Wihana Kirana. (2009). *Penyusunan Analisis Standar Belanja*. Yogyakarta: PSEKP UGM